



Media Title	Investor Daily		
Head Line	VGF Tol Manado-Bitung Tunggu Restu Kemenkeu		
Date	17 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	19	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

VGF Tol Manado-Bitung Tunggu Restu Kemenkeu

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemberian dana dukungan pemerintah atau *viability gap fund* (VGF) sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan proyek tol Manado-Bitung. Jika Kemenkeu setuju, proyek ini bakal menjadi yang pertama untuk dibiayai pemerintah dengan skema tersebut.

“Hingga saat ini, kami masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan untuk VGF-nya. Peralunya, mereka ingin ikut terlibat dalam proyek ini dari awal, seperti desain, studi kelayakan, dan lainnya, terutama di proyek jalan tol dan listrik,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murtanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pembangunan tol Manado-Bitung sepanjang 38 kilometer akan dibangun beberapa seksi. Namun, yang akan dibangun pertama kali adalah seksi I Manado-Airmadidi sepanjang 12,5 kilometer, karena pembebasan lahan sudah selesai. Adapun seksi II dari Airmadidi ke Bitung sepanjang 25,5 km masih dalam proses pengadaan lahan.

Apabila Kemenkeu menyetujui pemberian dana VGF tersebut, lanjut dia, dana dukungan pemerintah akan dikurangkan ke rekening investor pemenang tender yang juga akan bertanggung jawab dalam pembangunan

proyek secara penuh. Dengan demikian, proyek ini bakal menjadi yang pertama dibiayai oleh pemerintah dengan skema VGF. “Selama ini bukan tidak ada dukungan pemerintah melalui APBN. (Dukungan APBN) ada, tetapi melalui pagu anggaran di Ditjen Bina Marga,” ujar dia.

Anggaran yang ada Ditjen Bina Marga, lanjut Djoko, juga digunakan untuk membangun jalan tol dalam bentuk fisik, sebagaimana jalan tol Solo-Kertosono, tol Medan-Kualanamu, dan tol Ciluenyi-Sumedang-Dawuan. “Bila Kemenkeu tidak setuju, tol tersebut juga tetap akan dibangun untuk seksi I. Namun, nanti dana menggunakan pagu anggaran Ditjen Bina Marga. Ini berarti skema proyek tolnya berupa *government support* seperti ruas tol-tol tadi,” jelas Djoko.

Kendati demikian, lanjut dia, pembangunan jalan tol tersebut baru bisa dilakukan pada awal 2015 dan diperkirakan selesai pada 2017. Sedangkan untuk pengerjaan dan pengelolaan tol ini, pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) saat ini tengah melakukan penjajakan pasar (*market sounding*) untuk proyek senilai Rp 4 triliun ini.

Pengadaan Lahan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali sebelumnya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengang-

garkan Rp 100 miliar yang digunakan untuk pengadaan lahan pada tahun ini. “Mereka juga meminta bantuan dana pembebasan lahan sebesar Rp 150 miliar dari pemerintah pusat,” ujar dia.

Dana pemerintah pusat tersebut akan melengkapi anggaran belanja daerah (APBD) tahun 2014 sebesar Rp 50 miliar yang disiapkan untuk pembebasan lahan jalan tol. “Memang ada *support* dana dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Namun soal besarnya, pemerintah setempat yang lebih tahu. Mereka juga yang akan melakukan pembebasan lahan di wilayahnya,” tutur dia. Gani mengatakan, pemerintah provinsi menargetkan pembebasan lahan akan dituntaskan pada tahun ini sehingga proses-proses selanjutnya seperti peletakan batu pertama (*groundbreaking*) serta lelang segera dilaksanakan.

“Karena itu, pemerintah provinsi sangat mengharapkan dukungan penuh semua pihak, termasuk masyarakat pemilik lahan yang akan dilintasi ruas jalan tol ini. Ini mengingat ketika ruas jalan ini selesai dibangun, peningkatan kesejahteraan akan terjadi,” ungkap dia.

Proyek jalan tol Manado-Bitung ini masuk dalam *Public Private Partnership Book 2014* dan berkategori potensial untuk dikerjakan oleh investor swasta. (ean)